

FORMULASI ADMINISTRASI DESA MELALUI PENGEMBANGAN KAMPUNG DIGITAL DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG

Jehan Ridho Izharsyah¹, Agung Saputra², Ananda Mahardika³, Atikah Ulayya⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

⁴Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

jehanridho@umsu.ac.id¹, Agungsaputra@umsu.ac.id², Anandamahardika@umsu.ac.id³,
Atikahulayya@umsu.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Desa digital atau kampung digital merupakan transformasi desa atau kelurahan dalam mendukung terciptanya kota pintar atau *smart city*. Aplikatif dalam mendukung terciptanya desa digital diperuntukan dalam membangun administrasi berbasis digital, jaringan internet *Wireless Fidelity* (WIFI) desa sebagai wujud transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Tujuan kegiatan pengabdian ini pertama melakukan pelatihan administrasi manual serta melakukan transisi berbasis online; kedua, pelatihan penggunaan perangkat lunak perkantoran (*Microsoft Office*) dan internet dengan teknik website sistem. Mitra yang terlibat dalam pengabdian ini yaitu desa Pematang Johar kabupaten Deli Serdang. Metode pengabdian dengan sosialisasi, pelatihan serta *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil pengabdian yang dicapai *Pertama*, Konsep *New Public Service* (NPS) telah terimplementasi dengan baik pada mitra hal ini dibuktikan dengan perbaikan informasi pelayanan di website dan portal informasi desa. *Kedua*, Praktik pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan pendekatan Komunikasi dan Advokasi kebijakan kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan konsep pelayanan melalui jaringan desa dan internet desa misalnya : BUMDES, Pendidikan dan pelaku usaha mikro lainnya.

Kata Kunci: Formulasi Administrasi; Kampung Digital; E-Government.

Abstract: A digital village or digital village is a village or urban village transformation in supporting the creation of a smart city or smart city. Applicative in supporting the creation of a digital village is intended to build digital-based administration, the village *Wireless Fidelity* (WIFI) internet network as a form of transparency, accountability and participation. The purpose of this service activity is to first conduct manual administration training and make online-based transitions; second, training on the use of office software (*Microsoft Office*) and the internet with website system techniques. The partner involved in this service is the village of nails, Deli Serdang district. The service method is through socialization, training and *Focus Group Discussion* (FGD). The result of the service achieved First, The *New public Service* (NPS) Concept has been well implemented for partners, this is evidenced by the improvement of service information on the website and village information portal, Secondly, The Practice Of Digital Based service management with a communication and Policy advocacy approach to the community has been implemented with the concept of service trough village networks and village internet for example : BUMDES, Education and other micro enterprises.

Keywords: Administration Formulation, Digital Village, E-Government.



Article History:

Received: 02-08-2022

Revised : 30-08-2022

Accepted: 02-09-2022

Online : 15-10-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Desa Digital sebagai katalisator perbaikan pelayanan publik Ekonomi Desa yang menerapkan sistem pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Pada desa digital direncanakan akan memiliki website dan akun media sosial untuk promosi dan berita, sistem *e-commerce* serta aplikasi yang sesuai karakter dan komoditi. Permasalahan pelayanan pun sering muncul dengan peralihan sistem konvensional administrasi desa secara manual atau offline misalnya pelayanan dalam mengakses informasi desa, penyusunan anggaran desa dan lain (Irlan Fardani Et.al, 2021). Perbaikan pelayanan publik berbasis digital di desa merupakan salah satu tujuan serta nawacita presiden republik indonesia sebagai proyeksi pembangunan indonesia dimasa yang akan datang. Perbaikan desa baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Kelemahan dari pelayanan digital di Indonesia juga muncul dari sumberdaya manusia yang mengelolanya. Baik dalam kualitas pendidikan, kemampuan penggunaan komputer serta mutu lulusan sekolah yang tidak mampu mengalokasikan sistem pelayanan. Keterangan ini sesuai dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Martinelli Ida. Et.al, 2021). Kendala yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia dalam melakukan optimalisasi penggunaan internet serta jaringan pedesaan diantaranya rendahnya pendidikan dari masyarakat pedesaan maka perlu adanya tenaga ahli (*expert*) sebagai tenaga sosial yang dapat melakukan edukasi terhadap masyarakat desa baik dalam aspek pekerja sosial dan perencanaan sosial (Vito & Hetty K., 2015).

Desa Pematang Johar merupakan salah satu dari lima desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Nama desa pematang Johar sendiri berasal dari nama pohon besar yang ada di desa tersebut yang dinamakan pohon johar yang secara teritorial pematang johar sendiri terdiri dari pesawahan dan lahan perkebunan lainnya (desa Pematang Johar, 2021). Luas Wilayah Pematang Johar Sendiri sebesar 2.217,84 Ha dengan peruntukan pesawahan 1.750 Ha, Pemukiman 367 Ha, Ladang 7 Ha, Perkarangan 25 Ha, Perkebunan 10 Ha, Tambah atau lahan Gambut 35 Ha dan Prasarana Umum lainnya 23.84 Ha. Selain teritorial yang strategis desa pematang johar juga memiliki jumlah penduduk yang dapat dikatakan cukup banyak. Berdasarkan data Penduduk tahun 2018 Jumlah Total penduduk desa pematang johar sebanyak 15.192 jiwa (pmd.deliserdangkab, 2022). Banyaknya penduduk itu juga menjadi alasan dalam memperbaiki sistem pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat Pematang Johar. Kualitas Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar menjadi pekerjaan besar

bagi pemerintah Desa secara langsung dalam melengkapi perangkat kerja desa dengan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, pelatihan perangkat desa dalam menggunakan komputer perangkat lunak perkantoran serta perbaikan sistem informasi keuangan desa berbasis digital dengan menjalin integrasi dan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Permasalahan yang ada pada mitra pada saat ini diantaranya desa Pematang johar belum maksimal dalam merancang *supporting system* dalam pelayanan berbasis digital terutama *website* dan masih dalam tahap pengembangan, kedua, Pengembangan sumber daya manusia yang belum maksimal terutama dalam mengelola teknologi informasi terutama dalam membangun pelayan *New Public Service* (NPS). Maka dari itu dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut dalam mitra, Upaya yang akan dilakukan dalam membantu mengatasi permasalahan mitra diantaranya: *Pertama*, Membantu merancang dan mengembangkan permasalahan tata kelola Pelayanan Administrasi berbasis digital dengan Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) praktik pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan pendekatan Komunikasi dan Advokasi kebijakan kepada masyarakat. *Kedua*, Memberikan informasi serta pemahaman tentang pelayanan publik di era *metaverse* ini dengan pengembangan keilmuan yang dilakukan pada kegiatan Seminar serta pelatihan dasar administrasi dan Pelayanan publik dengan konsep *New Public Service* (NPS) di Era *disrupsi* atau *Metaverse*. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan perbaikan pelayanan publik di desa Pematang Johar.

Perbaikan pelayanan publik dalam hal ini adalah mengupayakan terciptanya integrasi serta pelayanan publik yang dibangun desa pematang johar dengan masyarakat ataupun stakeholder agar terciptanya partisipasi serta transparansi kebijakan secara menyeluruh maka, perlu dikuatkannya pelayanan administrasi berbasis digital dan *New Public Service* (NPS) (Budd, 2007). Penerapan teori Penta Helix Pelayanan Publik memiliki beberapa integrasi kepentingan yang harus dikuatkan melalui Government, Civil Society, Privat, Akademisi serta Media untuk dapat sama – sama membangun kepercayaan publik agar tidak menimbulkan *trush public manajemen* (Ansell C, 2007).

Berdasarkan perencanaan diatas maka tujuan serta upaya yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian ini adalah : *Pertama*, Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa Pematang Johar dan masyarakat melalui *Focus Group Discussion* (FGD) praktik pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan pendekatan Komunikasi dan Advokasi kebijakan yang memberikan pemahaman dalam tata kelola partisipasi pelayanan publik. *Kedua*, Memberikan

pemahaman tentang Konsep *New Public Service* (NPS) kepada aparatur pemerintahan desa dengan melakukan Seminar serta pelatihan dasar administrasi dan Pelayanan publik dengan konsep *New Public Service* (NPS) di Era disrupsi atau *Metaverse*.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dilakukan dengan persuasif misalnya dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara langsung (Sugiyono, 2017). Pelaksanaan program pengabdian masyarakat kepada mitra yang melibatkan beberapa kelompok kepentingan diantaranya: Aparatur desa, Kepala Dusun (Kadus), Administrator Desa, Pengurus BUMDES, Ibu PKK dan lain-lain. Pelaksanaan Kegiatan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Awal

Melakukan Seminar serta pelatihan dasar administrasi dan Pelayanan publik dengan konsep *New Public Service* (NPS) di Era disrupsi atau *Metaverse*.

2. Tahap Kedua

Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) praktik pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan pendekatan Komunikasi dan Advokasi kebijakan kepada masyarakat.

3. Tahap Ketiga

Melakukan Pendampingan sebagai bagian dari desa mitra yang terintegrasi dengan perguruan tinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

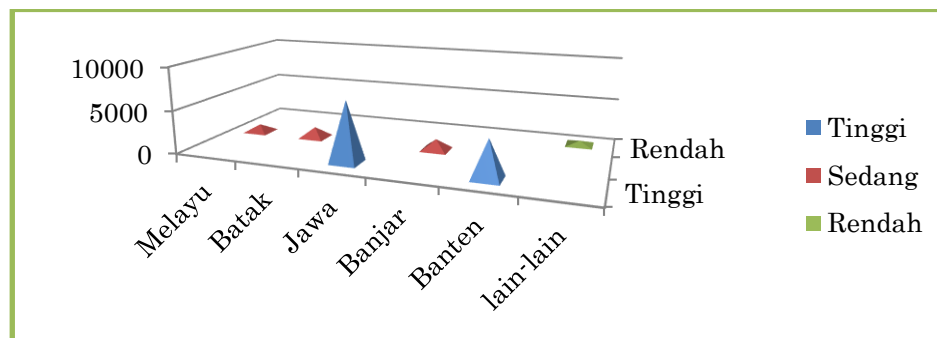
Desa Pematang Johar merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki komoditas dan pendapatan Asli Desa yang cukup baik. Pendapatan desa tersebut didukung dengan semangat masyarakat dan pemerintah desa pematang Johar dalam menjalin komunikasi terutama pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat. Desa Pematang Johar juga memiliki visi agar desa pematang johar menjadi desa mandiri yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat utama desa dan masyarakat di luar desa pada umumnya. Program-program unggulan pun terciptakan dengan baik. Diantaranya: Program lainnya yang menjadikan Desa Pematang johar menjadi desa unggulan di Kabupaten Deli Serdang dan Propinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Wisata Sawah (Kampung Sawah) yang menjadi program unggulan dengan panorama, edukasi serta kuliner yang langsung dikelola oleh BUMDES Desa Pematang Johar.
- b. Pembangunan Partisipasi masyarakat cukup tinggi, baik

dalam aspek pembangunan non fisik dan fisik hal ini terlihat pada tahun 2017-2018 saja sebesar Rp. 2.781.300 dengan penggunaan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat diantaranya: membeli mobil patroli, mobil ambulan dan mobil pengangkut sampah.

- c. Gerakan Seribu Rupiah.
- d. Penyuluhan tentang ketertiban dan keamanan desa melalui penyuluhan siskamling.
- e. Melakukan patroli desa dan memberlakukan jam malam dengan satu pintu masuk satu pintu keluar desa.
- f. Melakukan program pendidikan dengan jam belajar sampai pukul 21.00 Wib (pmd.deliserdangkab, 2022).

Sikap dan Keterbukaan yang dibangun oleh Pemerintah Desa Pematang Johar juga terlihat dengan adanya integrasi yang dibangun oleh pemerintah desa baik dalam pemerintahan, Akademisi, Media, Privat dan swasta. Dalam pandangan kebudayaan dan aspek demografi masyarakat sendiri, Desa Pematang Johar memiliki karakteristik tersendiri. Hal tersebut terlihat pada multi etnis yang berada pada desa tersebut. Pada Tahun 2018 Desa Pematang Johar sendiri memiliki Etnis Melayu 896 jiwa, Batak 1.247 jiwa, Jawa 6.979 jiwa, Banjar 1.260 jiwa, Banten 4.316 jiwa dan lain-lain 493 jiwa (pmd.deliserdangkab, 2022). Keterangan tersebut seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar. 1. Kondisi Demografi Masyarakat Desa Pematang Johar Tahun 2018.

Dalam aktifitas pengabdian ini tentunya melibatkan seluruh aparatur pemerintahan desa, pengurus Badan dan lembaga serta masyarakat desa Pematang Johar. Maka langkah-langkah kegiatan pengabdian yang dilakukan diantaranya:

- a. Melakukan Seminar serta pelatihan dasar administrasi dan Pelayanan publik dengan konsep *New Public Service* (NPS) di Era disrupsi atau *Metaverse*. Kegiatan ini berlangsung seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Pemateri I dan II (konsep *New Public Service* (NPS) di Era disrupsi atau *Metaverse*)

Website resmi Desa Pematang Johar <https://desapematangjohar.deliserdangkab.go.id/> dan youtube <https://www.youtube.com/watch?v=q7sJFwRkQtE>. Seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Website Resmi (Informasi digital Desa): (a) Website Resmi yang dibangun Oleh Pemerintah Desa Pematang Johar; dan (b) Chanel youtube Profil Pematang Johar.

b. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) praktik pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan pendekatan Komunikasi dan Advokasi kebijakan kepada masyarakat (Pemerintah Desa Pematang Johar, Trainer Bumdes, Pengelola BUMDES Desa Pematang Johar), seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar.4 Pendampingan Desa Mitra Pemateri III dan IV (Trainer BUMDES)

Pendampingan *Pertama* yang dilakukan oleh tim kepada mitra ialah menjelaskan dasar administrasi dan Pelayanan publik dengan konsep *New Public Service* (NPS) di Era disrupsi atau

Metaverse. Pada dasarnya betapa penting pelayanan publik berbasis digital di era sekarang apalagi masa transisi pandemi ke era adaptasi pasca pandemi. Desa Pematang Johar telah melakukan pelayanan berbasis digital dilihat mereka telah menyusun pelayanan publik secara terbuka (*Transparaency administration*). Keterbukaan pelayanan ini dibuktikan dengan website resmi <https://desapematangjohar.deliserdangkab.go.id/>. Aplikatif yang terlihat dalam pengabdian ini dalam Pelatihan *New Public Service* (NPS) desa pematang Johar diantaranya seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel. 1. Aplikatif Konsep New Public Service Denhart (2003) di Desa Pematang Johar

Konsep Denhart (2003)	Desa Pematang Johar
1. Melayani Warga Negara, bukan <i>customer</i> (<i>Serve Citizens, Not Customer</i>).	Pemerintah Desa Pematang Johar melakukan Pelayanan secara akuntabel, tranparansi dan partisipasi melalui website dan langsung secara optimal.
2. Mengutamakan Kepentingan Publik (<i>Seeks the Public Interest</i>).	Kebijakan serta regulasi yang diberikan pemerintah desa pematang johar selalu mengupayakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat misalnya : “Gerakan Seribu Rupiah”, SISKAMLING desa, Jam belajar malam, satu pintu desa, mobil ambulan, angkutan sampah, batik, desa sawah dan lain-lain.
3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan (<i>Value Citizenship over Entrepreneurship</i>).	Pemerintah desa Pematang Johar dalam konsep ini memakai keduanya Kewarganegaraan dan kewirausahaan sama sama penting. Hal ini terlihat dari program Pendidikan dan BUMDES Pemberdayaan masyarakat.
4. Berpikir Bertindak Strategis, Demokratis (<i>Think Strategically, Act Democratically</i>).	Pemerintah Desa Pematang Johar melakukan beberapa program dengan taktis dan strategis. Strategis dalam melihat peluang dan demokrasi dalam keterbukaan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui dan diakses seluruh masyarakat umum.
5. Tahu kalau Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (<i>Recognize that accountability is not Simple</i>).	Pertanggungjawaban dalam perspektif <i>Good Governance</i> sangat penting dimiliki oleh seluruh desa di Indonesia. Pemerintah Desa Pematang Johar memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi hal ini terlihat dari setiap aktifitas publik yang melibatkan para stakeholder diantaranya : Government, Swasta, akademisi dan media cetak dan elektronik. Dan informasi dapat di akses pada website

		https://portal.deliserdangkab.go.id/ dan https://desapematangjohar.deliserdangkab.go.id/
6. Melayani Ketimbang Mengarahkan (<i>Serve Rather than Steer</i>).	(<i>Serve</i>)	Konsep yang diaplikasikan pemerintah desa Pematang Johar melakukan kombinasi dengan pelayanan dan pengarahan. <i>Public service and Actuating</i> . Hal ini terlihat dari setiap kebijakan yang diberikan oleh kepala desa secara umum terstruktur dan massif. Diketahui oleh seluruh kalangan dan diarahkan dengan melibatkan badan dan lembaga desa misalnya BUMDES.
7. Menghargai Bukan Produktivitas (<i>Value People, Not Productivity</i>).	Manusia, Sekedar (<i>Value Just</i>)	Konsep Pemanfaatan partisipatif kepada masyarakat merupakan salah satu indikator dan strategi pemerintah desa pematang johar. Hal ini aktifitas desa melibatkan masyarakat secara umum baik yang produktif maupun non produktif. Misalnya BUMDES, Batik, Siskamling, dan lain-lain.

Sumber: Analisis Kondisi Mitra Pengabdian (Desa Pematang Johar) 2021.

Kedua, Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) praktik pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan pendekatan Komunikasi dan Advokasi kebijakan kepada masyarakat. Konsep Komunikasi dan Advokasi kebijakan dalam pelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah desa pematang johar secara umum. Akan tetapi, dalam aplikatif partisipatif masyarakat belum optimal misalnya: masyarakat masih terjebak dengan zona nyaman yang telah di upayakan oleh pemerintah desa misalnya fasilitas desa dan lain-lain. Dalam konsep ini masyarakat juga dituntut untuk dapat berdikari secara mandiri sesuai dengan kompetensi serta kemampuan dan peluang yang dimiliki. Konsep komunikasi dalam hal ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam menguatkan pelayanan publik di masa sekarang. Misalnya: partisipasi masyarakat sebagai modal *good governance* sehingga tidak adanya kesalahpahaman dan kuatnya sistem akuntabilitas kepada masyarakat. Konsep ini dinilai efektif dengan adanya keterbukaan yang baik, dan partisipatif masyarakat dalam mengawal setiap perlindungan baik dalam fisik maupun non fisik.

2. Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring terhadap mitra dan kondisi pada saat pra kegiatan dan aktifitas yang dilakukan di lokasi pengabdian, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel. 2. Prioritas dan Strategis dan Perencanaan Administrasi

Prioritas	Strategis dan Perencanaan	Nilai Bobot
	<i>Strenght- Opportunity (SO)</i>	1,68 + 1,35 = 3,03
I	1. Penguatan Pemahaman Pelayanan publik berbasis digital dengan pelatihan Administrator atau operator Desa (SDM).	
	2. Pemanfaatan Program serta kebijakan pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menjadi desa digital.	
	3. Penguatan Pelayanan desa dengan <i>Smart Village</i> , melek huruf, melek ekonomi dan melek digital.	
	<i>Strenght – Treats (ST)</i>	1,68 + 1,29 = 2,97
II	1. Melakukan Pemantauan terhadap kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
	2. Penguatan Pelayanan desa melalui pelayanan berbasis digital.	
	<i>Weakness – Opportunity (WO)</i>	1,43 + 1,35 = 2,78
III	1. Melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti pemerintah, swasta, akademisi dan lai-lain.	
	2. Melakukan Administrasi Pelayanan dengan sistem pelayanan publik yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Pematang Johar.	
	3. Peningkatan mutu serta kualitas sistem dengan menggandeng Mitra IT.	
	<i>Weakness – Threats (WT)</i>	1,43 + 1,29 = 2,72
IV	1. Pelatihan serta pembinaan terhadap kualitas pelayanan khususnya berbasis digital.	
	2. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi pemerintah desa melalui penguatan regulasi pelayanan digital dengan melakukan updating data setiap tahun.	
	3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan berbasis digital dan peluang sistem administrasi.	

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut pemerintah desa Pematang Johar perlu melakukan kebijakan dan perencanaan pada Prioritas I yaitu dengan (1) Penguatan Pemahaman Pelayanan publik berbasis digital dengan pelatihan Administrator atau operator Desa (SDM); (2) Pemanfaatan Program serta kebijakan pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menjadi desa digital; dan (3) Penguatan Pelayanan desa dengan *Smart Village*, melek huruf, melek ekonomi dan melek digital.

3. Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Kendala yang dihadapi mitra dalam upaya perbaikan sistem pelayanan berbasis digital ialah:

- a. Perlu adanya peningkatan penetapan konsep pada sektor

usaha desa yang berbasis digital. Misalnya Pematang Johar memiliki beberapa Bumdes seperti : Penyediaan ATK, Foto copy, BRI LINK, Batik Sawah, Unit Usaha WIFI (Hotspot), Layanan Pembayaran Sistem Online. Usaha-usaha jasa ini bagian dari pelayanan di era *New Public Service* maka perlu kemudahan pelayanan dengan pengembangan sebagian besar UMKM. Hal ini seperti pengabdian yang dilakukan oleh (Suyatna Rahmat, 2019) bahwa Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bahwa Konsep desa digital ini adalah wacana yang harus terus disuarakan agar masyarakat desa menjadi lebih berdaya.

- b. Pusat informasi yang berada pada saat ini belum sepenuhnya dilakukan updating data. Informasi yang berada pada website resmi masih belum update. Misalnya: Desa Pematang Johar Data informasi jumlah penduduk terakhir pada tahun 2018, Informasi Program Desa pada tahun 2018, dan informasi aktifitas Bumdes dan lainnya belum begitu uptodate. Maka, perlu adanya peningkatan perangkat lunak dan Tenaga Survei Desa. Hal ini seperti pengabdian yang dilakukan (Siti Asmaniyah. et.al, 2020). Bahwa Dengan tema Digitalisasi Desa untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Informasi Desa Putat Lorsebagai program kerja dari tim KKN kelompok 74 tahun 2020 yang memiliki tujuan mengubah proses pengurusan dan layanan administrasi di Desa Putat Lor menjadi lebih baik kualitasnya dan informasi tentang Desa Putat Lor lebih mudah dicari oleh masyarakat luasdengan memperbaharui perangkat lunak/sotfware dan mengakseskan situs website khusus untuk memaparkan Desa Putat Lor dan potensi-potensinya.
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan *E-Commerce* sebagai sarana pemasaran produk industri wisata dan UMKM. Keterangan ini menjelaskan bahwa informasi secara digital yang diberikan Pemerintah Pematang Johar dalam industri wisata dan UMKM belum maksimal dan menjadi kendala beberapa desa di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengabdian yang dilakukan (Fadlan R & Fardani i, 2020) dan (Cordella & Tempini, 2015). Bahwa Pemanfaatan *E-Commerce* adalah bagian langkah strategis kesiapan STOPE dalam pemasaran produk industri wisata dan UMKM.
- d. Perlu penguatan sarana promosi desa lebih intensitas melalui website desa pematang johar. Penguatan terhadap potensi kewilayahan dengan manajemen pelayanan publik dengan informasi baik dari informasi pusat, daerah hingga desa. Hal ini sesuai dengan pengabdian yang dilakukan (Nikmatul Izah. et.al, 2021) dan (Krisnani et.al, 2015). Bahwa Pemahaman Pemerintah desa dalam pelayanan publik berbasis digital

- menjadi upaya dalam memaksimalkan pelayanan satu pintu dan prima.
- e. Belum maksimalnya beberapa pelayanan publik yang berhubungan dengan masyarakat yang terintegrasi dan berstandar SNI. Misalnya ada beberapa *Home Industri* yang berada di Desa Pematang Johar yang belum berstandar SNI. Hal ini sesuai dengan pengabdian yang dilakukan (Sri Frapanti. et.al, 2020) dan (Alamsyah, 2016). Bahwa Legalitas, Nilai Jual serta uji kelayakan perlu memiliki standar SNI sehingga nilai jual akan mendukung tinggi di pasaran.
 - f. Perlu adanya menu informasi khusus bagi pemasaran, pendidikan, sosial budaya serta informasi lainnya yang dapat dianggap sebagai inovasi desa pematang Johar. Hal ini sesuai dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Rokhman Ali, 2019). Bahwa inisiatif desa dermaji melalui proses Gerakan Desa Membangun dalam berbagai aspek tanpa melibatkan pemerintah pusat.
 - g. Belum maksimalnya Peran Komunitas Pemuda di desa Pematang Johar dalam melakukan publikasi serta framing informasi baik dalam pelayanan publik dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Beriansyah Alva. et.al, 2021) dan (Jehan & Faizal, 2021). Bahwa Komunitas pemuda desa memiliki peran penting dalam pengelolaan website desa dan media sosial desa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan perencanaan yang telah dilaksanakan pada desa mitra maka dapat dicapai simpulan sebagai berikut: Pertama, Konsep *New Public Service* (NPS) telah terimplementasi dengan baik pada mitra hal ini dibuktikan dengan perbaikan informasi pelayanan di website dan portal informasi desa. *Kedua*, Praktik pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan pendekatan Komunikasi dan Advokasi kebijakan kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan konsep pelayanan melalui jaringan desa dan internet desa misalnya: BUMDES, Pendidikan dan pelaku usaha mikro lainnya.

Saran yang diberikan berdasarkan hasil pengabdian ini adalah Perlu adanya peningkatan penetapan konsep pada sektor usaha desa yang berbasis digital, *updating* pusat informasi desa, pemanfaatan *E- Commerce* sebagai sarana pemasaran produk industri wisata dan UMKM, Perlu penguatan sarana promosi desa lebih intensitas melalui website desa pematang johar, pelayanan publik yang berhubungan dengan masyarakat yang terintegrasi dan berstandar SNI, Perlu adanya menu informasi khusus bagi pemasaran,

pendidikan, sosial budaya serta informasi lainnya yang dapat dianggap sebagai inovasi desa pematang Johar dan maksimalnya Peran Komunitas Pemuda di desa Pematang Johar dalam melakukan publikasi serta framing informasi baik dalam pelayanan publik dan potensi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis Mengucapkan Terima Kasih Kepada: (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; dan (2) Mitra Pemerintah Desa Pematang Johar diantaranya: Aparatur desa, Kepala Dusun (Kadus), Administrator Desa, Pengurus BUMDES, Ibu PKK.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Publik Profetik*.
- Ansell C, A. G. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Beriansyah Alva. et.al. (2021). Pendampingan Pengembangan Desa Digital Melalui Komuitas Pemuda Di Desa Pematang Jering Kabupaten Muaro Jambi. *Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–19.
- Budd, L. (2007). Post-bureaucracy and reanimating public governance: A discourse and practice of continuity? *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/09513550710818403>
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005>
- desa Pematang Johar. (2021). *Desa Pematang Johar*. <https://Desapematangjohar.Deliserdangkab.Go.Id/Blog/Halaman/Sejarah-Desa-Pematang-Johar>.
- Fadlan R & Fardani i. (2020). Kajian Kesiapan Penerapan Desa Digital Pada Desa Wisata Dengan Pendekatan Model STOPE di Desa Sukalaksana. *Prosiding Perencana Wilayah Dan Kota*, 6(2), 220–227.
- Irland Fardani Et.al. (2021). Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang. *Resona : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 181–197.
- Jehan & Faizal. (2021). Mapping And Construct Bumdes Di Kabupaten Simalungun (Nagori Totap Majawa, Nagori Marubun Jaya, Nagori Parbalogan). *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 2031–2041.
- Krisnani et.al. (2015). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13581>
- Martinelli Ida. Et.al. (2021). Sosialisasi Mutu Lulusan Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu. *Comumunity Empoerment*, 6(12), 2303–2314.
- Nikmatul Izah. et.al. (2021). Pendampingan Digitalisasi Desa Berbasis Website Sebagai Upaya Meningkatkan Potensi Ekonomi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi. *Jurnal Soeropati*, 3(2), 135–144.
- pmd.deliserdangkab. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang*. <https://Pmd.Deliserdangkab.Go.Id/Kecamatan-Labuhan-Deli.Html>.

<https://pmd.deliserdangkab.go.id/>

- Rokhman Ali. (2019). Desa di Era Digital (Studi Kasus Tentang Inovasi Desa di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asosiasi Ilmu Administrasi Negara)*, 7(2), 67–75.
- Siti Asmaniyah. et.al. (2020). Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi. *Jurnal Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(3), 188–192.
- Sri Frapanti. et.al. (2020). Pendampingan Legalitas Mutu Berstandart SNI Guna Meningkatkan Pendapatan Home Industri Batu Bata Di Desa Sido Urip Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. *Prodikmas (Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(1), 41–46.
- Sugiyono. (2017). *prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive.com).pdf*.
- Suyatna Rahmat. (2019). Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Lingkar Widya Swara*, 06(01), 22–26.
- Vito & Hetty K. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. *Prosiding KS : Riset Dan PKM*, 2(2), 147–300.